

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah saat ini maka, peningkatan penerimaan pajak daerah dirasa perlu. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilaksanakan dengan berbagai strategidan yang perlu diingat ialah pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dan mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Analisis rasio keuangan menjadi salah alat yang dapat dipakai untuk mengetahui sejauh mana perkembangan keuangan suatu daerah. Disamping untuk mengetahui perkembangan usaha hal ini juga sangat penting dilakukan pemerintah daerah untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya menghindari kekurangan dari likuiditas keuangan yang diharapkan. Selain mengacu pada

pajak, belanja modal menjadi hal yang kuat dalam indikator kenaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli daerah pada Kabupaten/Kota Se Jawa Timur tahun 2019-2020, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum¹. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi pemerintah².

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat dalam anggaran. Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian³. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik

¹ Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang keuangan daerah

² kementerian keuangan republik Indonesia direktorat jendral anggaran

³Halim, A. 2007. *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah. Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, hal. 90

untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁴. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari kegiatan perekonomian yang berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin meningkat sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan

⁴ Sari, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Sulawesi Utara tahun 2004-2014*. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019

nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi

Beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan hasil yang bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi⁵. Rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada. Infrastruktur, sarana dan prasarana dalam APBD tertuang dalam alokasi belanja modal. Kinerja keuangan pemerintah dengan pengalokasian belanja modal yang cukup akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah⁶.

Secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Secara khusus interaksi alokasi belanja modal memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan keuangan dan kemandirian keuangan pada pertumbuhan ekonomi⁷. Adapun pengaruh desentralisasi, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi dengan

⁵ Hamzah, A. 2008. *Analisa kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan: pendekatan analisis jalur (studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Propinsi Jawa Timur periode 2001-2006)*. Jurnal SNA XI Pontianak. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019

⁶ Annisa, G.R. 2011. *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, pengangguran dan kemiskinan dengan kinerja keuangan sebagai variabel anteseden (studi kasus pada pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur)*. Skripsi tidak dipublikasikan Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta

⁷ Prihastuti, dkk. 2015. *Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Riau*. Jurnal Sorot, 10(2): 143-154

interaksi alokasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Kinerja keuangan daerah mempengaruhi alokasi belanja modal, alokasi belanja modal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi khususnya dimulai dari usaha kecil.

Kinerja memiliki banyak aspek, namun para ekonomi biasanya hanya memusatkan pada 3 aspek pokok yaitu efisiensi, kemajuan teknologi, dan keseimbangan dalam distribusi". Dan secara sederhana perhitungan efisiensi adalah menghasilkan suatu nilai yang maksimum dalam jumlah input tertentu, baik secara kuantitatif fisik maupun nilai ekonomis (harga). Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa sejumlah input yang bersifat bonus dihindari sehingga tidak ada sumber daya yang tidak digunakan dan dibuang. Efisiensi sendiri digolongkan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan pengalokasian⁸.

Melihat keadaan yang ada maka pengukuran pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dapat dilakukan dengan mengkombinasikan analisis perbandingan laporan keuangan, analisis trend (pertumbuhan) dan analisis rasio.

Tabel 1.1
Pendapatan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini menggunakan judul "Perbedaan Peran Belanja Modal, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

⁸ Jaya, Wihana Kirana, 1993, *Ekonomi Industri*, Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada

Kabupaten	Tahun 2019		Tahun 2020	
	pendapatan	belanja	Pendapatan	Belanja
Pacitan	1.655.570.691.444	1.319.565.470.690	1.655.537.179.548	1.629.539.754.070
Ponorogo	2.196.373.717.903	2.209.577.154.751	2.282.633.033.615	2.218.931.163.459
Trenggalek	1.679.630.943.592	1.676.002.531.074	1.789.654.976.359	1.694.689.484.414
Tulungagung	2.450.329.539.474	2.440.401.670.669	2.477.645.159.518	2.428.378.017.362
Blitar	2.221.699.483.391	2.264.622.439.298	2.292.443.782.672	1.835.180.026.326
Kediri	2.626.169.696.680	2.712.418.646.924	2.845.942.911.906	2.711.633.157.811
Malang	3.741.599.099.301	3.617.598.905.267	3.820.588.161.838	3.126.083.209.368
Lumajang	1.868.373.791.602	1.921.039.204.002	1.990.863.368.171	1.667.049.154.466
Jember	3.395.951.246.557	3.491.324.172.017	3.571.024.257.629	3.339.151.955.801
Banyuwangi	2.702.744.797.766	2.680.092.436.592	2.989.670.986.567	2.415.494.022.687
Bondowoso	1.840.309.590.992	1.838.175.794.008	2.031.465.485.391	1.935.997.394.539
Situbondo	1.614.120.520.648	1.393.175.737.274	1.684.255.453.311	1.469.841.543.557
Probolinggo	1.969.104.360.637	2.001.617.073.289	2.118.902.827.203	2.121.512.009.221
Pasuruan	3.066.709.804.770	3.099.989.624.565	3.190.282.021.755	3.140.653.024.051
Sidoarjo	3.986.502.178.195	3.062.295.426.988	4.204.323.272.909	4.060.359.920.162
Mojokerto	2.335.531.986.035	1.907.923.803.679	2.416.954.141.842	2.342.377.716.651
Jombang	2.384.285.290.789	2.106.186.927.305	2.507.481.974.029	2.353.823.298.509
Nganjuk	2.119.570.044.562	2.062.702.442.977	2.305.945.907.647	2.263.065.197.925
Madiun	1.697.020.630.854	1.735.931.606.003	1.743.427.769.881	1.590.739.322.716
Magetan	1.692.479.818.071	1.569.215.837.358	1.813.572.550.741	1.679.817.786.759
Ngawi	1.996.684.191.402	2.070.890.723.722	1.884.921.532.753	1.810.274.057.028
Bojonegoro	2.931.682.298.664	2.727.290.016.110	4.776.771.334.292	2.973.498.911.983
Tuban	2.346.777.907.554	2.265.144.479.827	2.384.522.067.132	2.347.524.148.737
Lamongan	2.699.679.329.721	2.701.065.497.222	2.777.708.743.067	2.769.959.887.621
Gresik	2.726.642.470.874	2.630.529.232.832	2.843.413.714.591	2.643.535.029.654

Bangkalan	2.085.290.587.481	1.523.538.495.210	2.052.246.621.035	1.686.182.664.340
Sampang	1.602.607.079.650	1.387.275.046.920	1.697.686.173.639	1.688.227.591.627
Pamekasan	1.888.517.461.440	1.858.293.157.524	1.841.066.172.893	1.670.804.629.672
Sumenep	2.093.241.230.175	1.974.154.332.359	2.220.785.188.585	2.124.262.596.250
Kota				
Kediri	1.109.633.036.176	1.122.089.227.051	1.271.914.678.012	833.321.993.564
Blitar	833.431.546.950	767.438.194.526	877.501.560.058	794.266.449.781
Malang	1.904.539.343.501	1.746.533.125.527	1.973.355.585.264	1.864.946.665.861
Probolinggo	798.327.251.491	829.115.101.014	952.712.929.367	927.011.456.661
Pasuruan	834.020.177.402	812.352.715.436	899.166.632.587	807.902.274.260
Mojokerto	745.759.750.245	713.452.470.948	872.267.632.864	796.121.767.343
Madiun	952.604.695.670	929.496.087.313	1.002.048.280.272	1.022.884.909.394
Surabaya	8.016.878.490.794	7.881.587.706.004	8.170.854.369.269	8.177.037.822.230
Batu	849.411.343.203	764.886.224.699	970.701.288.049	837.835.826.203

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang variabel-variabel yang diteliti, membatasi permasalahan yang diteliti dan lokasi penelitian sehingga tidak akan menyimpang dari penelitian yang dikehendaki. Adapaun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dilakukan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang dipengaruhi oleh belanja modal daerah.
2. Penelitian dilakukan dengan melakukan pengambilan data dari Bps Se Jawa Timur

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur?
2. Bagaimana Perbedaan Belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui Perbedaan Belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teori, penelitian ini mengetahui penggunaan belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur dalam mempengaruhi kinerja keuangan. Hal tersebut dapat diketahui dengan perubahan pencatatan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur serta terhadap daya beli yang dimiliki masyarakat Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penguatan data dalam melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan secara luas dan kinerja keuangan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur secara khusus.

- b. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penggunaan dana APBD dalam menentukan belanja modal pada tahun anggaran berikutnya.

c. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu disempurnakan dengan penelitian berikutnya menggunakan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

F. Pengesahan Istilah

Dalam pengesahan istilah ini untuk menghindari kesalah pahaman istilah-istilah yang terdapat dalam pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Perbedaan Peran Belanja Modal, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur”.

1. Secara Konseptual

Belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah kekayaan atau aset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum⁹.

Kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi laba dan kinerja keuangan menggambarkan usaha perusahaan (*operating income*)¹⁰

2. Secara Teknis

⁹ Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang keuangan daerah

¹⁰ Yully, *Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan*, Jurnal Ekonomi Bisnis Tahun 14 Nomor 3. Diakses 15 Maret 2019 hal: 54

pendapatan asli daerah (PAD) atau pendapatan dari pemerintah. pada penelitian ini merupakan kemampuan sebuah daerah/ kota/ Kabupaten/Kota dalam mengalokasikan keuangan yang didapatkan baik dari

Belanja modal merupakan proses pelaksanaan penggunaan keuangan daerah yang diarahkan terhadap kebutuhan permodalan dan dapat memberikan kenaikan income perkapita.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman/pembagian pembahasan maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I menjelaskan dan memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, pengesahan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II menjelaskan mengenai seluruh kajian kepustakaan yang digunakan peneliti sebagai dasar teori pada penelitian, selanjutnya kajian terhadap penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian dan yang terakhir adalah kerangka berfikir penelitian.

BAB III merupakan metodologi penelitian yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian, menjabarkan pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian serta analisis data yang akan digunakan.

BAB IV berisi pengumpulan data yang didapatkan selama pelaksanaan penelitian, baik berupa data primer atau data langsung dari hasil penelitian maupun data sekunder yang merupakan data asli tempat penelitian

BAB V berisikan penjabaran seluruh data yang didapat selama pelaksanaan penelitian, hasil analisa dan pembahasan hasil dikaji dari pendapat ahli dan teori pendukung.

BAB VI berisikan kesimpulan penelitian dan jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdapat di BAB I. Pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian yang didapat.